

PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

IMAS NURIL MAULIDAH
NPM 0971010063

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Disusun oleh :

IMAS NURIL MAULIDAH
NPM. 0971010063

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

MAS ANIENDA TF., SH., MH.
NPT 3 7709 07 0223

Mengetahui,
Dekan

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP 19620625 199103 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Oleh :

IMAS NURIL MAULIDAH
NPM 0971010063

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 5 Juni 2013

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

MAS ANIENDA TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

MAS ANIENDA TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

3.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI, M.Hum
NPT. 2 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Oleh :

IMAS NURIL MAULIDAH
NPM 0971010063

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 5 Juni 2013

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

MAS ANIENDA TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

MAS ANIENDA TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

3.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI, M.Hum
NPT. 2 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imas Nuril Maulidah
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 17 September 1991
NPM : 0971010063
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jalan Jambu AW 05 Peranti Baru Juanda Baru
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI DI PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO ” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing

Surabaya, 29 Mei 2013
Penulis

Mas Anienda TF, SH., M.H
NPT. 3 7709 07 0223

Imas Nuril Maulidah
NPM. 0971010063

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbila'lamin Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Permohonan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo ”

Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu sebagai tahapan dalam pengajuan skripsi untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Drs. M. Asymuni, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan segala bentuk upaya bantuan berupa pemberian data-data yang penulis butuhkan.

3. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak Drs.Ec. Gendut Soekarno, MS., selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Subani, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Mas Anienda TF, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali yang membantu semasa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan dedikasinya serta ilmunya kepada saya semoga berguna bagi nusa dan bangsa.
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang sudah banyak membantu dalam kemudahan administrasi.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs Moch Ali Imran dan Ibu Maria Suryoningsih serta kakak-kakakku tersayang Imas Nur Laila, S. Sos.i, M.Pd.I , Anas Machmudi, S. Sos.i dan untuk kekasihku Syafi’ Uddin yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
11. Tak lupa kepada teman-teman yang banyak memberikan dukungan Edo, Fredi, Tomi, Mbak Retno, Ratna dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya bisa membangun penulis harapan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Surabaya, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL `	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.5.1 Tinjauan Umum Pengadilan Agama	8
1.5.2 Tinjauan Umum Adopsi (Pengangkatan Anak)	10
1.5.2.1 Adopsi Secara Etimologi	10
1.5.2.2 Adopsi Secara Terminologi	11

1.5.2.3 Adopsi Menurut Undang-Undang	12
1.5.2.4 Adopsi Menurut Pendapat Para Ahli Hukum	13
1.5.2.5 Adopsi Dalam Tiga Sistem Hukum	15
a. Adopsi Menurut Hukum Barat	15
b. Adopsi Menurut Hukum Adat	17
c. Adopsi Menurut Hukum Islam	17
1.5.3 Sebab-Sebab Pengangkatan Anak	18
1.5.4 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	24
1.5.5 Tata Cara Pengangkatan Anak	29
1.5.6 Tujuan Pengangkatan Anak	32
1.6 Metode Penelitian	34
1.6.1 Jenis Penelitian	34
1.6.2 Sumber Bahan Data	35
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	38
1.6.4 Metode Analisis Data	39
1.6.5 Lokasi Penelitian	40
1.6.6 Sistematika Penulisan	40
BAB II PELAKSANAAN ADOPSI DI PA SIDOARJO	42
2.1 Faktor Penyebab Adopsi.....	42
2.2 Prosedur Permohonan Adopsi di PA Sidoarjo	45
2.3 Analisis Pelaksanaan Adopsi di PA Sidoarjo	54
BAB III KONSEKUENSI YURIDIS PENETAPAN ADOPSI	57

3.1 Hubungan Hukum Anak dengan Orangtua Angkat	57
3.2 Hak Waris Anak Angkat.....	59
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Pelayanan adopsi di PA Sidoarjo	44
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Permohonan Adopsi di PA Sidoarjo	46
Gambar 1. Prosedur Persidangan Permohonan Adopsi di PA Sidoarjo	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2. Wawancara dengan Panitera Pengganti

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Imas Nuril Maulidah
NPM : 0971010063
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 17 September 1991
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

ABSTRAKSI

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri seorang manusia yang normal, namun harus kita sadari bahwa semua kuasa ada di tangan Allah SWT, jika Allah SWT tidak menghendaki, maka keinginan manusia pun tidak akan tercapai. Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak dan berusaha untuk memperoleh anak, meskipun anak tersebut bukan hasil dari perkawinannya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo dan konsekuensi yuridis penetapan adopsi. Penulis membahas tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan mengkaji secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan adopsi yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk tahun 2011 dan tahun 2012 paling banyak permohonan adopsi dengan alasan belum mempunyai anak. Dan dalam pengajuan permohonan adopsi, pemohon mendaftarkan permohonan, penerimaan permohonan, penetapan hari sidang, persidangan, pembacaan penetapan hakim. Untuk permohonan adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo ini, tidak ada hambatan dalam pengajuan adopsi.

Disamping itu, konsekuensi yuridis penetapan adopsi untuk Hubungan hukum antara orangtua angkat terhadap anak angkatnya tidak menimbulkan hubungan apa-apa kecuali hanya sebatas memelihara, mengasuh, merawat, mendidik, melindungi si anak angkat untuk kesejahteraan dan kebaikan si anak angkat. Jadi hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya masih tetap dan tidak putus.

Kata kunci : Adopsi, pengadilan agama

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi dan melengkapi. Hal inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan melakukan suatu hubungan sosial. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan baik, maka manusia yang hidup dalam kelompoknya membuat aturan hukum yang mengikat setiap orang yang tinggal dalam kelompoknya.

Dalam kehidupannya, manusia mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa penting tersebut menimbulkan akibat hukum dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Sejak saat awal kehidupan, termasuk dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian manusia disebut subjek hukum. Kemudian setelah dewasa, manusia akan menikah dan memiliki anak yang akan meneruskan keturunannya sebagai generasi berikutnya.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan. Akan tetapi tidak semua perkawinan itu dapat menghasilkan keturunan.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.

Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat-melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya¹

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri seorang manusia yang normal, namun harus kita sadari bahwa semua kuasa ada di tangan Allah SWT, jika Allah SWT tidak menghendaki, maka keinginan manusia pun tidak akan tercapai. Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak dan berusaha untuk memperoleh anak, meskipun anak tersebut bukan hasil dari perkawinannya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) dengan maksud memelihara dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri.

¹ Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 6

Pada awalnya tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Tetapi dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak berubah menjadi untuk kesejahteraan anak, hal ini tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan:

“Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Dalam perkembangannya, tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas tujuan untuk meneruskan keturunan saja, tidak jarang karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hanya didapat setelah diperoleh kepastian dari suatu keputusan pengadilan.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak sebagai tindak lanjut dari SEMA

Nomor 6 Tahun 1983. Surat Edaran ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam mengambil keputusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Sekarang dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 – Pasal 48 yang isinya juga diatur tentang Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pula mengenai prosedur/syarat pengangkatan anak dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Jenis pengangkatan anak berdasarkan Pasal 7 PP RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan

b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Selanjutnya Berdasarkan jenis pengangkatan anak yang dibedakan diatas, Penulis akan membahas tentang pengangkatan anak jenis yang pertama yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ada beberapa cara dalam melakukan pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, salah satunya yaitu pengangkatan anak melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Berdasarkan Pasal 63 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama islam sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya.

Orang-orang beragama islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu² berdasarkan hukum islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama. Beberapa Pengadilan Agama

² Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta : Media Grafika, 2008, hlm 58

telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam UU RI No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum islam sebagai kewenangan pengadilan agama.

Alasan penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sidoarjo di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, karena tentang Permohonan pengangkatan anak pada tahun 2011 sebanyak 13 perkara dan pada tahun 2012 menjadi 16 perkara yang terbilang banyak, dengan sebab atau alasan yang bermacam-macam dalam pengajuan Permohonan pengangkatan anak misalnya dengan alasan akan membiayai pendidikan si anak yang akan diangkat . Penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan jelas tentang realita pengangkatan anak dikalangan masyarakat Sidoarjo. Juga tentang pelaksanaan pengangkatan anak cara melalui pengadilan agama sidoarjo. Di dasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan dengan judul “Pelaksanaan Permohonan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo?
- b. Bagaimana konsekuensi yuridis penetapan adopsi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis penetapan adopsi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan masyarakat umum sebagai sumber informasi untuk melakukan adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat yang mengadopsi tentang betapa pentingnya memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak adopsi tersebut.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan adopsi anak

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Pengadilan Agama

Pengadilan yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak³ yaitu :

1. Kompetensi Relatif

Pengadilan yang berwenang untuk mengesahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman anak yang akan diangkat. Hal ini ditegaskan dalam butir IV SEMA No 63 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran no 2 tahun 1979.

2. Kompetensi Absolut

Pengadilan negeri adalah merupakan badan peralihan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik domestic adoption maupun inter-country adoption, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi dalam perluasan kewenangan pengadilan agama di Indonesia sejak

³ Pandika Rusli, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012, hlm 119

berlakunya UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sehingga pengadilan agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam”

Berdasarkan Pasal 49 UU RI No 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU RI No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah dan
- i. Ekonomi syariah

Yang dimaksud dengan perkawinan berdasarkan dalam penjelasan Pasal 49 UU RI No 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU RI No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perubahan
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah

6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta gono gini
11. Penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman anak yang akan diangkat.

1.5.2 Tinjauan Umum Adopsi (pengangkatan anak)

1.5.2.1 Pengertian Adopsi secara etimologi

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari kata Belanda *adoptie* atau *adoption* (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut

Tabbani yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan “ittikhadzahu ibnan”, yaitu menjadikannya sebagai anak.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi, disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) di over ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak⁴.

1.5.2.2 Adopsi secara terminologi

Dari segi terminologi Adopsi diartikan : Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu : anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

Dalam ensiklopedia umum disebutkan : adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus

⁴ Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta : PT Sinar Grafika, 1995, hlm 4

memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak⁵

1.5.2.3 Adopsi menurut undang-undang

Pengertian anak angkat berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengertian berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa yang dimaksud dengan :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat.

⁵ Ibid., hlm 5

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.5.2.4 Adopsi menurut pendapat para ahli hukum

Pengertian adopsi atau anak angkat adalah perbuatan mengangkat atau memungut anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak atau dimasukkan ke dalam anggota keluarga sedemikian sehingga mengakibatkan orang yang mengangkat atau memungut anak dengan anak yang diangkat atau dipungut timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri⁶.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum⁷.

Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan : anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan

⁶ Dzulkifli dan Utsman, Kamus Hukum, Quantum Media Press, 2010, hlm 13

⁷ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2004, hlm 35

keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga⁸.

Sedangkan Surojo Wignjodipuro dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat memberi batasan sebagai berikut : Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri⁹.

Mahmud Syaltut seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fachtur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu¹⁰ : (Pertama) yakni penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. (Kedua) yakni dipahamkan dari perkataan “tabbani” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabbani adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya,

⁸ R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2005, hlm 175

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Menurut R. Soepomo, adopsi adalah anak orang lain sebagai anak sendiri¹¹.

J.A. Nota seorang ahli hukum belanda khusus mempelajari adopsi memberi rumusan bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya¹²

1.5.2.5 Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Tiga sistem hukum

a. Adopsi Menurut Hukum Barat

KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak luar kawin yakni dalam BW buku I bab IX bagian III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena di dalam KUHPerdata tidak mengenal adopsi, maka bagi orang belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun belanda sendiri baru-baru ini telah menerima dengan baik undang-

¹¹ Ibid., hlm 176

¹² Ibid.

undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni :

§ Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar

§ Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan

§ Lahirnya banyak anak di luar perkawinan

Di dalam perkembangan adopsi dalam hukum barat perbuatan mengangkat anak atau adopsi telah dikenal oleh berbagai negara bahkan sejak zaman dahulu di seluruh dunia telah dikenal dan dilakukan pengangkatan anak sebagai cara untuk memperoleh kedudukan di dalam masyarakat primitif. Atas dasar dianggap seakan-akan ada pertalian darah sehingga timbul keluarga buatan. Dengan demikian adopsi merupakan perbuatan manusia yang masuk dalam perbuatan perdata sehingga melibatkan persoalan dalam hubungan antar manusia. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut pemerintahan belanda tahun 1917 mengeluarkan staatsblad No 129 Pasal 5-15 yang khususnya mengatur masalah adopsi atau anak angkat. Bagi golongan tionghoa staatsblad ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPperdata yang ada. Maka untuk

mempermasalahkan adopsi menurut versi barat semata-mata harus beranjak dari staatblad tersebut¹³.

b. Adopsi dalam hukum adat

Mengenai adopsi sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang berbagai tempat di dunia ini baik oleh masyarakat yang primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Cara melakukan pengangkatan anak itu banyak macamnya, terutama di Indonesia sendiri mempunyai banyak ragam sistem peradatannya. Pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan pada pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengadopsi tergantung padanya . mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung kepadanya. Mengenai harta kekayaan anak bersangkutan juga tergantung kepada hubungan pertalian darah atau tidak. Begitu pula mengenai kedudukan tersebut di dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu¹⁴.

c. Adopsi dalam hukum islam

Menurut sejarahnya, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima keRasullannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid Putra Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Nabi Muhammad. Kemudian

¹³ Ibid., hlm 178

¹⁴ Ibid., hlm 182

anak tersebut dimerdekakan dan diangkat sebagai anak serta namanya diganti dengan Zaid bin Muhammad. Sesudah Muahmmad menjadi Rosul turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang waris mewaris bahwa hanya kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian yang bertentangan dalam agama islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama seperti anak kandungannya sendiri¹⁵

1.5.3 Sebab-Sebab Pengangkatan Anak

Berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, bahwa Motifasi adopsi di Indonesia di tinjau dari segi hukum adat ada 14 macam, yaitu :

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami isteri.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena di samping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal

¹⁵ Ibid., hlm 197

di dasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya mempunyai banyak tanah untuk digarap maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan tambahan untuk pengelolaannya. Untuk ini yang paling baik adalah dengan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak angkat akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain.

7. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
8. Karena factor kepercayaan. Dalam hal ini di samping motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat attau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
12. Ada juga yang merasa kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup,

tetapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung-katung bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, disamping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.

13. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

14. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motifasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita¹⁶.

Menurut Djaja S. Meliala, dalam bukunya yang berjudul “Pengangkatan Anak di Indonesia” latar belakang dilakukan pengangkatan anak yaitu :

¹⁶ Muderis Zaini, op.cit., hlm 63

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. e) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- e. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga¹⁷.

Menurut Hilman Hadikusumo pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai keturunan.
- b. Tidak ada penerus keturunan.
- c. Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja¹⁸.

M. Budiarto, dalam bukunya yang berjudul “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum” bahwa faktor atau latar belakang dilakukan pengangkatan anak, yaitu :

- a. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.

¹⁷ Suci Wulansari, Pengangkatan Anak, <http://forumadopsianak.wordpress.com/2012/04/11/pengangkatan-anak>, diunduh pada tanggal 15 maret 2013, Pukul 15.00 WIB

¹⁸ Ibid.

- b. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
- c. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- d. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya¹⁹.

Alasan pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (artificial), adoption naturam imiratur, dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan²⁰.

Alasan mengangkat anak antara lain :

- a. Seorang janda dapat mengangkat anak dengan maksud untuk melanjutkan garis keturunan mendiang suaminya. (Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No 97/Pdt/Tbn tanggal 19 Januari 1970)
- b. Secara hukum adat pengangkatan anak dengan tujuan untuk kepentingan anak, karena ibu si anak meninggal tidak lama setelah melahirkannya. (Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 40/Vol/1979/Pdt.Kdl)
- c. Untuk kepentingan si anak, maka dikabulkan permohonan pengangkatan anak atas dua orang anak di bawah umur. (Ketetapan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Pandika Rusli, op.cit., hlm 40

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 48/JS/1980 tanggal 18 Februari 1980)

- d. Karena tidak mempunyai anak perempuan, maka dikabulkannya pengangkatan anak perempuan oleh suami istri yang telah mempunyai 6 orang anak laki-laki. (Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 1505/1978/P tanggal 2 November 1978)²¹

1.5.4 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam staatsblad 1979 No 129 Pasal 8 yaitu untuk pengangkatan anak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak.
2. a. dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya atau jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih di bawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan Balai Harta Peninggalan
b. dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih di bawah umur harus berdasar persetujuan walinya dan Balai Harta Peninggalan.
3. Persetujuan dari anak yang akan diangkat, jika anak tersebut telah berusia 15 tahun.
4. Dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, jika

²¹ Ibid., hlm 56

orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan yang telah dewasa dari garis bapak suaminya yang meninggal sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Syarat-syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu :

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas meliputi :
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat untuk calon orang tua yang akan mengangkat anak berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu :

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak

- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI

Berdasarkan SEMA No 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 tahun 1979, hal-hal yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon) :
 - a. Pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.
2. Syarat bagi calon anak yang diangkat :
 - a. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan social harus dilampirkan surat izin tertulis menteri social bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dalam bidang pengangkatan anak.
 - b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari menteri social atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak Selanjutnya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984. Antara lain di cantumkan tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia²² :

1. Calon Orang Tua Angkat:
 - a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun
 - b. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin selama 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaan sebagai berikut:
 1. Tidak mungkin memiliki anak (dengan surat keterangan dari dokter kebidanan/dokter ahli) atau
 2. Belum mempunyai anak atau
 3. Mempunyai satu anak kandung atau
 4. Mempunyai satu anak angkat dan tidak mempunyai anak kandung
 - c. Dalam keadaan mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat
 - d. Berkelakuan baik, sesuai dengan surat keterangan dari kepolisian RI

²² Ka'bah Rifyal, Pengangkatan Anak Dalam UU no 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Akibat Hukumnya, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2006

- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
 - f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak
2. Calon Anak Angkat :
- a. Berumur kurang dari 5 (lima) tahun
 - b. Persetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui ada)
 - c. Berada dalam asuhan organisasi sosial

Persyaratan (surat-surat) yang harus dilengkapi antara lain :

- 1. Permohonan pengangkatan anak dari Pemohon (calon orang tua angkat) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- 2. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- 3. Foto copi Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- 4. Foto copi Akta Nikah Pemohon
- 5. Foto copi Kartu Keluarga (KK) orang tua kandung anak
- 6. Foto copi Akta Nikah orang tua kandung anak
- 7. Surat Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat yang diketahui Kepala Desa tempat tinggal anak atau yang dibuat dihadapan Notaris
- 8. Foto copi Akta Lahir anak yang diangkat

9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan)
10. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah
11. Laporan Sosial dari Pekerja Sosial (PNS pada Dinas Sosial Kabupaten atau orang yang ditunjuk oleh Lembaga Pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak)
12. Surat Pernyataan dari Pemohon (calon orang tua angkat) bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
13. Surat Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten bagi anak angkat yang berasal dari Lembaga Pengasuhan anak yang memiliki izin untuk bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak
14. Izin dari Menteri Sosial (Kepala Dinas Sosial Provinsi) bagi pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat tunggal (tidak menikah/janda/duda)²³

1.5.5 Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak antar warga negara indonesia berdasarkan PP RI No 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu :

²³ Syarat Pengangkatan Anak, http://www.pn-tapaktuan.go.id/24_syarat_pengangkatan_anak.html , diunduh pada tanggal 15 maret 2013, Pukul 15.10 WIB

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

1. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan
2. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait

Pasal 21

1. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun
2. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat

Tata cara pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum kesanak saudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak dalam sistem hukum adat. Sehingga dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara itu maka suatu tindakan pengangkatan anak menjadi sah. Keabsahan pengangkatan anak ini merupakan titik tolak dalam menentukan atau menegaskan status hubungan hukum seseorang yang diangkat anak.

Masalah ini bukan saja akan membawa pengaruh dalam hubungan-hubungan kekerabatan dan social, melainkan juga menyangkut soal pewarisan²⁴.

Di dalam hukum dikenal dua cara pengangkatan anak yaitu :

1. Pengangkatan anak secara langsung

Yaitu : mengangkat seorang anak secara langsung sebagai anak

2. Pengangkatan anak secara tidak langsung²⁵

Yaitu : pengangkatan anak melalui suatu perkawinan

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia yaitu:

1. Pengangkatan anak secara adat

Cara berfikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya. Pengangkatan anak secara adat ini dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Misalnya di daerah Pontianak, ditandai dengan si anak minum setetes darah dari orang tua angkatnya-darah dari susu sebelah kanan-yang dicampur dengan tuak. Kemudian si anak dan orang tua kandungnya melakukan pembayaran adat sebesar 2 ulun (dinar) sebagai tanda pelepasan anak tersebut. Apabila yang menghendaki pengangkatan anak tersebut adalah orang tua kandung, maka jumlah pembayaran sebesar 2 ulun. Apabila yang menghendaki adalah orang tua angkat, dibebaskan dari

²⁴ Pandika Rusli, op.cit., hlm 43

²⁵ Ibid., hlm 48

pembayaran. Tetapi jika yang menghendaki adalah keduanya yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung maka harus membayar sebesar 4 ulun

2. Pengangkatan anak melalui notaris

Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan staatsblad 1917 Nomor 129 yang secara imperative menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris.

3. Pengangkatan anak melalui pengadilan.

Kini, pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya melalui pengadilan negeri, tetapi juga melalui pengadilan agama. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya²⁶.

1.5.6 Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak berdasarkan Pasal 2 PP RI No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu : pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Musthofa, op.cit., hlm 49

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam²⁷. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat bervariasi sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Adalagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil.

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua)²⁸ : pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat dan kedua untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama menekankan pada kepentingan orang tua angkat dan tujuan demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak²⁹. Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung tetapi di dalam pengangkatan anak, sisi

²⁷ Ibid, hlm 41

²⁸ Ibid, hlm 42

²⁹ Musthafa, Op.cit., hlm 106

kehidupan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan.

Tujuan pengangkatan anak pada dasarnya adalah :

- a. Untuk mempertahankan keturunan dan sebagai kelangsungan hidup dari yang mengangkat anak. Juga diharapkan agar supaya kelak dikemudian hari apabila orang tua angkatnya sudah tidak mampu lagi bekerja maka si anak tersebut diharapkan akan dapat memelihara dan memberi nafkah sampai orang tua angkatnya meninggal dunia.
- b. Untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaan.
- c. Untuk menambah ketetraman dan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga, karena sudah barang tentu orang yang dalam keluarga tidak mempunyai anak maka merasa gelisah dan kurang tentram serta sepi dalam rumah tangganya.
- d. Untuk memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
- e. Adanya kepercayaan bahwa karena pengangkatan anak itu kemudian akan mendapat anak sendiri dalam hal ini yang disebut anak pancingan.
- f. Karena adanya rasa belas kasihan, mereka ingin menolong anaknya yang hidupnya kekurangan dan terlantar.
- g. Untuk mendapatkan bujang, yang dapat membantu pekerjaan orang tuanya dirumah³⁰.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan mengkaji secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan maksud memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapny.

³⁰ Syarat Pengangkatan Anak, <http://forumadopsianak.wordpress.com/2012/04/11/pengangkatan-anak>, diunduh pada tanggal 15 maret 2013, Pukul 15.00 WIB

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan adopsi yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak sebagai tindak lanjut dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983.

Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan maksud memperoleh gambaran yang sejelas jelasnya tentang Pelaksanaan Permohonan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.6.2 Sumber Bahan Data

Di dalam jenis penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku (hukum) dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Data

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, atau masyarakat (mengenai perilaku hukum)³¹.

Dalam penelitian ini digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari³² :

1. Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945
2. Peraturan dasar yaitu :
 - Batang tubuh UUD 1945
 - Ketetapan-ketetapan MPR
3. Peraturan perundang-undangan :
 - Undang-undang atau perpu
 - Peraturan pemerintah
 - Keputusan presiden
 - Peraturan daerah
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya : hukum adat
5. Yurisprudensi
6. Traktat

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :UI-Pres, 1986, hlm 51

³² Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011, hlm 113

7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya : KUHP dan KUHPerdota.

Berdasarkan teori di atas, hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintahan (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya³³.

Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatur-literatur hukum, internet, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan pada akhirnya dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 berdasarkan Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat

³³ Ibid., hlm 114

dengan permasalahannya maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir³⁴

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan observasi³⁵. Adapun maksudnya sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis secara deduktif.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya

³⁴ Ibid., hlm 114

³⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 201

penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim dan panitera hukum Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan permohonan adopsi

3. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari obyek yang diamati dengan cara mencermati langsung terhadap obyek penelitian. Dengan perkataan lain, pengamatan adalah kegiatan melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis, lisan dan perilakunya. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengkalsifikasi data yang diperoleh dari hasil penelitian data lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan data dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dengan data-data yang diperoleh.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis memilih Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai lokasi penelitian. Dengan alasan kebanyakan dari masyarakat yang bekerja di Surabaya memilih menetap di wilayah Sidoarjo sehingga angka pengangkatan anak di Sidoarjo jauh lebih banyak dari Surabaya. Selain itu, Sidoarjo memegang peranan sentral sebagai kota pendukung bagi perkembangan Surabaya yang nota bene merupakan kota metropolitan sesudah Jakarta.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi empat bab. Tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang berisi pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Bab Pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua. Dalam bab ini penulis akan menguraikan Pelaksanaan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang diuraikan dalam tiga sub bab yaitu Pertama, Faktor Penyebab Adopsi. Sub bab Kedua, Prosedur Permohonan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dan sub bab Ketiga, Analisis Pelaksanaan Adopsi di Pengadilan Agama Sidoarjo

Bab ketiga. Dalam dalam bab ini akan diuraikan konsekuensi yuridis penetapan adopsi yang diuraikan dalam dua sub bab yaitu Pertama mengenai Hubungan Hukum Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat dan sub bab Kedua mengenai Hak Waris Anak Angkat.

Bab keempat Penutup. Terdiri dari dua sub bab. Pertama, kesimpulan dari pembahasan bab kedua dan bab ketiga, sub bab kedua saran-saran penulis terhadap permasalahan tersebut.